

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI merupakan organisasi cendekiawan Muslim yang kemunculannya tidak bersifat kebetulan, melainkan berkaitan erat dengan perkembangan global dan nasional pada akhir dekade 1980-an dan juga awal 1990-an, khususnya pada berakhirnya Perang Dingin dan meredanya konflik ideologi dunia. Gambaran tentang politik dunia pasca Perang Dingin yang dibentuk oleh factor-faktor budaya yang serta melibatkan interaksi antar negara dan juga kelompok dari berbagai peradaban ini memang sangat disederhanakan. Kemajuan intelektual dan ilmiah yang ditunjukkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolutions* terjadi melalui pergeseran dari satu paradigma ke paradigma lainnya.

Maka perang dingin merupakan suatu paradigma utama dalam politik dunia selama kurang lebih empat decade, Dimana hubungan internasional dibingkai oleh persaingan ideologis, politik, ekonomi, dan militer antara dua blok besar yaitu negara-negara liberal demokratis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Namun seiring berakhirnya Perang Dingin pada akhir 1980-an paradigma tersebut menjadi semakin tidak memadai dalam menjelaskan dinamika baru politik dunia. Hingga pasca Perang Dingin tatanan internasional tidak lagi bersifat bipolar dan ideologis, melainkan berubah menjadi multipolar dan multikultural yang mana sumber utama konflik Kerjasama antar negara lebih ditentukan oleh faktor budaya dan peradaban daripada perbedaan ideologi atau sistem ekonomi, perubahan ini melahirkan suatu tatanan dunia baru yang menuntut kerangka pemikiran atau paradigma baru untuk memahami hubungan internasional.¹

Pada saat yang sama juga kebangkitan Islam di berbagai kawasan dunia Timur menempatkan Islam sebagai kekuatan peradaban alternatif yang dipersepsikan

¹Samuel P. Huntington, *The Clash Of Civilizations And The Remaking Of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996). hlm. 29-30

Barat sebagai ancaman. Dalam konteks Indonesia sendiri kebangkitan tersebut ditopang oleh munculnya kelas menengah santri terdidik akibat program modernisasi serta kebijakan Pendidikan Orde Baru, yang melahirkan generasi Muslim terpelajar, modern, berwawasan dan juga mampu menembus institusi-institusi modern, termasuk birokrasi pemerintahan yang sebelumnya didominasi kelompok non-santri. Perubahan sosial ini turut memengaruhi arah kebijakan negara serta meruntuhkan anggapan umat Islam sebagai mayoritas demografis namun minoritas secara teknis. Dengan bekal Pendidikan kebangsaan dan kenegaraan yang semakin matang, kaum santri tidak hanya berkembang secara mental tetapi juga intelektual, sehingga menciptakan ruang historis bagi lahirnya ICMI sebagai wadah pengembangan intelektual dan juga aspirasi umat Islam Indonesia.²

Namun respons atas kondisi umat Islam pada masa awal Orde Baru yang masih berada dalam posisi lemah, terutama dari sisi kualitas sumber daya manusia. Meskipun umat Islam pada saat itu mayoritas secara demografis keterbatasan dalam Pendidikan, keahlian, dan kapasitas sosial ekonomi menyebabkan mereka belum mampu berperan optimal dalam arena politik dan birokrasi negara yang saat itu didominasi oleh kelompok nasionalis, sekuler, Kristen, dan sosialis, sementara para pemimpin Masyumi dibatasi aktivitas politiknya. Hingga pada tahun 1970-an kalangan Islam belum mampu menyediakan sumber daya manusia unggulan yang dibutuhkan negara, seiring dengan kondisi masyarakat Indonesia yang disebut oleh Fachry Ali sebagai “masyarakat sawah” yaitu masyarakat agraris tradisional yang minim keahlian industri dan teknologi. Akibatnya juga politik Islam belum memiliki daya tawar yang kuat dan aspirasi umat Islam cenderung terpinggirkan, sehingga mendorong kebutuhan akan sebuah wadah Cendekiawan Muslim seperti ICMI pada periode berikutnya.³

Selain itu, kecurigaan pemerintah juga tercermin dalam sikap represif terhadap aspirasi politik umat Islam. Tuntutan untuk membebaskan sejumlah tokoh

² “Sejarah ICMI.” *Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)* <https://icmi.id/profil/sejarah>, (diakses pada 10 Februari 2026)

³ Moeftich Hasbullah, *Islam Dan Transformasi Masyarakat Nusantara: Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia*. (Depok: Kencana, 2017). hlm. 201

Masyumi yang ditahan serta Upaya menghidupkan Kembali partai Masyumi tidak memperoleh respons positif dari pemerintah. Penolakan tersebut menjadi sebuah kekhawatiran bahwa keberadaan partai Islam akan memicu konflik ideologis, memperuncing perbedaan politik serta berpotensi mengganggu stabilitas dan agenda Pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama rezim Orde Baru. Akibatnya juga ruang politik umat Islam pada masa itu cenderung dibatasi dan diarahkan agar tidak berkembang ke dalam bentuk kekuatan politik formal.

Dalam konteks relasi yang penuh ketegangan inilah, ICMI kemudian hadir sebagai alternatif saluran baru bagi ekspresi dan artikulasi, kemudian kemunculan ICMI diundang oleh banyak kalangan sebagai titik balik dalam hubungan negara dengan umat Islam, karena bagaimanapun organisasi ini mampu menjembatani aspirasi keislaman dengan kepentingan negara tanpa menampilkan wajah konfrontatif. Maka karena itu juga keberadaan ICMI sering dimaknai sebagai penanda meredanya kecurigaan pemerintah terhadap umat Islam, sekaligus membuka babak baru keterlibatan kaum intelektual Muslim dalam dinamika Pembangunan dan kehidupan kebangsaan Indonesia.⁴

Pembukaan Kongres Nasional I ICMI pada 6 Desember 1990, yang ditandai dengan Soeharto memukul bedug, menandai perubahan penting dalam konfigurasi politik Orde Baru. Tindakan ini meruntuhkan stereotip Soeharto sebagai pelindung kejawaan semata sekaligus menunjukkan dukungan negara terhadap organisasi elite Muslim yang berorientasi pada penguatan peran Islam, sebuah Langkah yang melampaui pola Orde Baru sebelumnya yang cenderung membatasi artikulasi politik Islam. Melalui Kebijakan ini, Soeharto tidak hanya membuka ruang partisipasi umat Islam dalam lingkaran elite kekuasaan, tetapi juga memanfaatkan dukungan Islam sebagai strategi merespons tantangan kalangan militer dan Gerakan prodemokrasi. Kemunculan ICMI pun menandai fase baru hubungan negara dan Islam, sekaligus menjadi puncak dari proses panjang pencarian wadah intelektual umat Islam Indonesia.⁵

⁴ Zuhroh Lathifah et al., *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*. (Yogyakarta: Adab Pres, 2020). hlm. 226

⁵ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam Dan Demokratisasi Di Indonesia*. (Yogyakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI), 2001). hlm. 225

Sebelum ICMI terbentuk sebenarnya telah muncul sejumlah upaya untuk menghimpun pemikiran dan peran cendekiawan Muslim. Pada tahun 1984 misalnya, telah terbentuk sebuah kelompok pemikir Islam yang diketuai oleh Mochtar Buchori dari LIPI. Namun, menurut Din Syamsuddin kelompok ini bukanlah cikal bakal langsung ICMI, melainkan lebih berfungsi sebagai forum internal yang bersifat terbatas serta berperan sebagai dapur pemikiran bagi Departemen Agama pada masa itu. Dengan demikian, kebutuhan akan sebuah organisasi Cendekiawan Muslim yang bersifat nasional, mandiri dan inklusif masih belum terjawab. Selanjutnya pada tahun 1986 dibentuk Forum Komunikasi Pemikir Islam (FKPI) yang merupakan gabungan cendekiawan Muslim dan aktivis LSM dengan A. Tirta Sudiro sebagai ketuanya. Kehadiran FKPI menunjukkan bahwa wacana pembentukan wadah cendekiawan Muslim telah berkembang lebih luas, meskipun masih bersifat sektoral dan belum mampu menyatukan seluruh potensi intelektual umat Islam secara harmonis.⁶

Narasi media massa yang menonjolkan peran lima mahasiswa Universitas Brawijaya dalam pembentukan ICMI cenderung menyederhanakan proses sejarah yang sesungguhnya lebih kompleks. Sejak tahap awal, sejumlah intelektual Muslim telah terlibat dalam perencanaan pembentukan ICMI, namun karena pertimbangan politik, keterlibatan para intelektual senior tersebut tidak banyak ditampilkan di ruang publik. Pertemuan di Malang sendiri berlangsung dalam konteks kunjungan M. Imaduddin ke Universitas Brawijaya yang berperan mendorong penyelenggaraan symposium nasional sebagai langkah awal pembentukan ICMI.⁷

Hingga gagasan tersebut berakar dari inisiatif M. Imaduddin pada tahun 1989 untuk membentuk sebuah organisasi cendekiawan Muslim berskala nasional dengan mengundang para pakar serta intelektual Muslim ke Yogyakarta saat itu. Muncul dorongan ini dari pengamatannya terhadap kenyataan bahwa banyak cendekiawan Muslim Indonesia telah banyak yang selesai Pendidikan doctoral atau S3, baik di dalam negeri ataupun luar negeri, tetapi tidak pernah Bersatu dalam satu

⁶ Haniah Hanafie, "ICMI Sebagai Kelompok Kepentingan." (Skripsi, Universitas Indonesia: 1996)

⁷ Op. cit. hlm. 227

tempat Bersama. Hal ini juga dilihat dari banyaknya kelompok-kelompok yang terpisah seperti Paradigma di Jakarta, Al-Falah di Surabaya, Salman di Bandung dan Shalahuddin di Yogyakarta. Undangan dari Imaduddin yang ingin mempersatukan umat Islam dan para cendekiawan ini mendapat sabutan dari Sebagian cendekiawan, meskipun ada beberapa tokoh yang memilih tidak hadir seperti Amien Rais yang pada saat itu mencurigai kedekatan Imaduddin dengan pemerintah. Gagasan untuk mempersatukan para cendekiawan ini kemudian didiskusikan Bersama para mahasiswa yang tergabung dalam jamaah fakultas Teknik dari Universitas Brawijaya, Malang.⁸

Secara normatif juga sejak awal ICMI memang diposisikan sebagai Gerakan intelektual yang menekankan penguatan iman dan takwa serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai basis Pembangunan sumber daya manusia Musli, bukan sebagai sarana politik praktis. Pandangan ini sejalan dengan Nakamura yang menolak anggapan bahwa ICMI semata-mata merupakan instrument manipulasi politik penguasa. Nakamura melihat kemunculan ICMI sebagai bagian dari proses historis Panjang kontribusi umat Islam dalam pembentukan negara bangsa Indonesia modern, sekaligus refleksi kebangkitan kelas menengah Muslim terdidik dalam konteks transformasi sosial politik Indonesia.⁹

Sejalan pemikiran tersebut, keanggotaan dan aktivisme dalam ICMI bersifat terbuka dan inklusif. Anggota ICMI yang bersala dari berbagai latar belakang organisasi, golongan, serta orientasi pemikiran, seperti Muhammadiyah salah satunya juga ada beberapa kelompok lainnya seperti Nahdatul Ulama, hingga kelompok-kelompok Islam lainnya. Perbedaan ini lah yang menjadi nilai-nilai dsara terhadap fokus utama ICMI, yakni penguatan iman, pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian,

⁸ Ibid

⁹ Saiful Mujani, "Kultur Kelas Menengah Muslim Dan Kelahiran ICMI: Tanggapan Terhadap R.W. Hefner Dan M. Nakamura." Dalam N. Fauzi (Ed.), *ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi*, (Bandung: Mizan, 1995) hlm. 76

ICMI berfungsi sebagai ruang temu cendekiawan Muslim lintas organisasi yang mengedepankan dialog intelektual dan kepentingan umat secara luas.¹⁰

Walaupun membuka ruang partisipasi anggotanya diberbagai bidang termasuk politik, ICMI tidak dirancang sebagai organisasi politik maupun berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Hal ini tidak lepas dari pengalaman historis umat Islam sebelumnya, di mana Islam politik kerap menimbulkan ketegangan dengan negara hingga meminggirkan peran umat Islam dalam struktur kekuasaan. Oleh karena itu, ICMI diarahkan pada peningkatan kualitas berpikir dan juga berkarya melalui pendekatan Islam kultural dengan memposisikan Islam sebagai nilai yang membentuk kehidupan berbangsa tanpa harus diwujudkan dalam bentuk negara Islam.

Pendekatan Islam kultural tersebut tercermin dalam program-program ICMI yang bersifat non politik dan berorientasi pada suatu pengembangan sumber daya manusia, penguatan etika sosial serta pengimplementasi nilai-nilai substansif Islam, terutama keadilan. Islam dipahami sebagai kekuatan moral dan kultural yang hadir melalui dakwah peningkatan publikasi keislaman, serta keberanian menampilkan identitas keislaman di ruang public. Strategi ini sekaligus menunjukkan bentuk akomodasi non-politik ICMI terhadap pemerintah Orde Baru sejalan dengan anggaran Dasar ICMI yang menegaskan karakter organisasi ini sebagai organisasi kebudayaan.¹¹

Menjelang kehadiran ICMI, tercatat sebanyak sekitar 49 intelektual Muslim terlibat sebagai pencetus awal yang terdiri dari 22 orang dari bidang teknologi, 11 cendekiawan bidang agama, 10 orang dari bidang sosial, serta 3 orang dari bidang ekonomi. Komposisi ini menunjukkan bahwa ICMI sejak awal dirancang sebagai organisasi cendekiawan Muslim yang bersifat multidisipliner dan tidak terbatas pada satu bidang keilmuan tertentu. Untuk hal tersebut menetapkan persiapan bagi lahirnya organisasi, pada tanggal 27 September 1990 B.J Habibie mengumpulkan para penggagas guna membahas berbagai Langkah strategis dan teknis menjelang awal yang besar guna membangun ICMI.

¹⁰ Hafidz Muftisany, *REFLEKSI USIA PERAK ICMI*. (Elementa Media, 2022)

¹¹ Robert W. Hefner Op. cit hlm. 230

Dalam dinamika awal ini pembentukan ICMI, keterlibatan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang organisasi menunjukkan karakter inklusif organisasi ini, termasuk kehadiran tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memiliki signifikansi baik dalam aspek pemikiran maupun struktural. Secara ideologis, orientasi kaum modernis yang menjadi suatu bagian dari penting dari ICMI, sebagaimana yang telah dianut oleh bagian-bagian pendukungnya seperti Muhammadiyah, HMI dan KAHMI tidak mengarah pada puritanisme agama yang sempit, melainkan menekankan perpaduan antara keislaman dan keindonesiaan secara seimbang.¹² dalam konteks tersebut, ICMI tidak dipahami sebagai arena tarik-menarik antar organisasi Islam melainkan wadah Bersama yang menghimpun berbagai elemen umat Islam dari latar belakang professional. Meskipun demikian NU dan Muhammadiyah tetap dipandang sebagai landasan sosia; paling mendasar yang memberikan arah nilai dan etika sosial umat Islam, sehingga turut ikut serta mewarnao orientasi pemikiran dan dinamika internal ICMI pada masa awal perkembangan.¹³

Secara organisatoris, tokoh-tokoh Muhammadiyah juga menempati posisi strategis dalam struktur kepemimpinan ICMI pada periode awal hingga satu periode kedepan, keterlibatan mereka bukan hanya sekedar kehadiran simbolis ini menunjukkan bahwa Muhammdiyah tidak hanya hadir sebagai kekuatan pendudukan pendukung, tetapi juga sebagai aktor penting dalam menentukan arah gerak orientasi pemikiran serta dinamika internal ICMI sejak masa-masa awal pembentukannya.¹⁴ Berikut tokoh-tokoh Muhammadiyah terkenal yang masuk kedalam kepengurusan awal ICMI.

¹² Herdi SRS, "ICMI Tantangan Ekonomi Politik Umat, Dan Problem Legitimasi." Dalam N. Fauzi (Ed.), *ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi*, (Bandung: Mizan, 1995) hlm.193

¹³ Nakamura, "ICMI Tidak Mungkin Jadi Organisasi Politik." Dalam N. Fauzi (Ed.), *ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi*, (Bandung: Mizan, 1995) hlm.313

¹⁴ A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad, *ICMI DINAMIKA POLITIK ISLAM DI INDONESIA*. (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1997)

No	Nama Tokoh	Peran Di Muhammadiyah	Peran di ICMI
1	Amien Rais	Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 1995-1998	Asisten 1 Ketua Umum ICMI
2	M. Dawam Rahardjo	Ketua Majelis Pembina Ekonomi PP Muhammadiyah	Wakil Ketua II Dewan pakar
3	Din Syamsudin	Ketua Umum PP Muhammadiyah Tahun 2005-2010	Anggota Dewan Penasehat
4	Kuntowijoyo	Anggota PP Muhammadiyah	Ketua Bidang Pengembangan Kebudayaan Sumber Daya Manusia
5	Ahmad Watik Pratiknya	Anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah (1995-2005), Koordinator Bidang Pendidikan, serta Koordinator Bidang Pembina Kesehatan dan Kesejahteraan PP Muhammadiyah	Ketua Departemen Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pembudayaan

Tabel 1 Peran di ICMI dan Muhammadiyah 1

Sumber: Koran Merdeka 18 Februari 1991

Kelima tokoh yang tercantum dalam table diatas merupakan representasi nyata dari keterlibatan aktif Muhammadiyah dalam pembentukan dan pengembangan ICMI. Masing-masih tokohnya membawa kapasitas intelektual serta latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, namun saling melengkapi dalam membangun wajah intelektual ICMI. Perlu dicatat juga bahwa sebagian jabatan Muhammadiyah yang tercantum dalam tabel merupakan posisi puncak yang diraih tokoh-tokoh

tersebut pada periode setelah 1991-1995, seperti jabatan Amien Rais dan Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pencantuman ini dimaksudkan untuk menunjukkan kapasitas dan legitimasi mereka sebagai representasi Muhammadiyah secara lebih luas, bukan sebagai jabatan yang diemban pada periode penelitian ini.

Amien Rais kala itu dikenal sebagai salah satu intelektual Muslim paling vokal di Indonesia, hadir sebagai figure sentral yang turut memberikan legitimasi politik dan intelektual bagi organisasi ini. M. Dawam Rahardjo membawa perspektik ekonomi dan wacana pemikiran Islam yang kritis, menjadikannya salah satu pemikir paling berpengaruh dalam Dewan Pakar ICMI. Din Syamsuddin berperan dalam jalur penasehat, memperkuat dimensi keagamaan dan jaringan organisatoris ICMI ditingkat nasional. Kuntowijoyo, dengan latar belakangnya sebagai sejarawan dan sastrawan, memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berakar pada nilai-nilai budaya dan keislaman. Sementara itu, Ahmad Watik Pratiknya dikenal sebagai tokoh yang terlibat aktif sejak proses persiapan pendirian ICMI, khususnya melalui jalur dakwah sosial keagamaan dan pengembangan intelektual Muslim dibidang Kesehatan dan pendidikan.¹⁵

Adapun batasan waktu penelitian ini difokuskan pada periode 1991 hingga 1995, difase ini adalah awal dan juga krusial dalam perjalanan ICMI sejak organisasi ini resmi berdiri. Periode ini mencakup masa konsolidasi internal, perumusan visi dan orientasi gerakan, hingga menguatnya peran ICMI sebagai wadah strategis kaum intelektual Muslim dalam kehidupan nasional. Pada rentang waktu inilah kelima tokoh Muhammadiyah tersebut menunjukkan peran paling penting. Kehadiran mereka dalam struktur ICMI periode ini menjadi bukti bahwa Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam terbesar yang memiliki andil signifikan dalam membentuk wajah intelektual Islam Indonesia di era Orde Baru. Pembatasan waktu ini dimaksudkan agar penelitian lebih terfokus dan mampu menangkap dinamika awal keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam ICMI secara historis dan kontekstual.

¹⁵ Agung Prihantoro dan Ihab Habudin, *Bintang Dari Argasoka Biografi Ahmad Watik Pratiknya*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018) hlm. 152

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka perlu adanya beberapa rumusan permasalahan penelitian guna memberikan suatu arahan dan juga batasan yang jelas pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang serta proses keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam ICMI tahun 1991?
2. Bagaimana Peran tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam ICMI tahun 1991-1995?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui latar belakang serta proses keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam ICMI tahun 1991
2. Mengetahui peran tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam ICMI tahun 1991-1995

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah suatu bentuk telaah mendalam terhadap berbagai literatur yang berfungsi sebagai landasan pemikiran dalam pelaksanaan penelitian. Dalam kajian ini, sumber-sumber yang digunakan meliputi beragam referensi, seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber relevan lainnya yang mendukung pembahasan topik penelitian. Penulis telah berhasil mengidentifikasi sejumlah sumber yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang sedang diteliti, di antaranya:

Pertama, Tesis karya Haniah Hanafi “*ICMI Sebagai kelompok Kepentingan*” 1996 dari Universitas Indonesia. Meskipun tidak berfokus pada tokoh tertentu tesis ini menjelaskan bahwa kelahiran ICMI melalui proses Panjang yang didahului oleh upaya pengorganisasian cendekiawan Muslim sejak tahun 1980-an. Fragmentasi cendekiawan Muslim yang tersebar diberbagai kota tanpa wadah yang solid menimbulkan keprihatinan, salah satunya bagi M. Imaduddin Abdulrahim yang kemudian menggagas perlunya forum besar untuk mempersatukan potensi

intelektual umat Islam. Tesis ini menyimpulkan bahwa ICMI merupakan hasil dinamika intelektual, sosial, dan politik umat Islam Indonesia yang mencerminkan pergeseran strategi perjuangan Islam dari pendekatan politik formal menuju pendekatan intelektual kultural. Perbedaananya, tesis ini mengkaji ICMI secara institusional dan kolektif, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada kontribusi spesifik tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam dinamika internal ICMI periode 1991-1995.

Kedua, Buku karya A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad *ICMI: Dinamika Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesendo. 1997), buku ini menjelaskan bahwa kelahiran ICMI melibatkan 49 intelektual Muslim dari berbagai bidang keilmuan seperti teknologi, agama, sosial dan ekonomi. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan peran tokoh Muhammadiyah dalam dinamika awal ICMI, baik dari segi pemikiran maupun kepemimpinan struktural. Buku ini juga menyoroti beragam sikap tokoh-tokoh Islam terhadap kelahiran ICMI yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Dengan demikian, buku ini menunjukkan bahwa keterlibatan para tokoh tidak hanya terbatas pada ranah pemikiran, tetapi juga secara struktural turut membentuk arah dan dinamika ICMI. Perbedaananya, buku ini mengkaji keterlibatan tokoh secara umum, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kontribusi tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam ICMI periode 1991-1995.

Ketiga, buku karya Ahmad Bahar, Afnan Malay, Ahmad Zaini Kabar, Dkk yang berjudul *"ICMI Kekuasaan dan Demokrasi"* (Yogyakarta: PT. Pena Pusaka. 1995). Buku ini membahas kemunculan ICMI dalam dinamika hubungan Islam, negara dan demokrasi di Indonesia pada awal 1990-an. Kelahiran ICMI dinilai memberi warna baru dalam kehidupan politik dan keagamaan nasional, seiring perubahan sikap umat Islam yang dimulai meninggalkan pola konfrontatif terhadap negara. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan konsep *high politics* yang dianut Muhammadiyah, yakni politik yang berorientasi pada nilai moral, etika, keadilan, dan demokratisasi, hal ini bukan sekedar perebutan kekuasaan. Konsep ini menjadi dasar normative bagi peran tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam ICMI. Perbedaananya, buku ini mengkaji ICMI dalam konteks relasi Islam dan negara

secara luas, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada kontribusi tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam dinamika internal ICMI periode 1991-1995.

Keempat, Skripsi karya Cicah Syamsiyah Syam berjudul “*Peranan ICMI dalam Pengembangan Sumber Daya Umat Islam di Indonesia Tahun 1990-2000*” tahun 2002 dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini mengkaji keberadaan ICMI sebagai wadah cendekiawan Muslim yang lahir dari pergeseran sosial dan ployik umat Islam Indonesia, serta perannya dalam pemberdayaan umat melalui berbagai Lembaga otonom seperti Bank Muamalat, CIDES, dan harian Republika. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan latar belakang berdirinya ICMI dan dinamikapro kontra di kalangan umat Islam atas kemunculannya. Perbedaannya, skripsi ini mengkaji peran ICMI secara institusional dalam pembedayaan umat secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik berffokus pada kontribusi tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam dinamika internal ICMI periode 1991-1995

E. Metode Penelitian

Penelitian sejarah dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi melalui kritik sumber untuk menilai keasliannya, tahap interpretasi yang meliputi analisis dan sintesis, serta diakhiri dengan penulisan sejarah. Untuk memperjelas pemahaman mengenai ragam kajian sejarah dengan sering digunakan contoh-contoh dari berbagai jenis sejarah, seprti sejarah pertahanan sejarah keluarga, politik, kota, hingga sejarah lokal. Penggunaan nama-nama daerah yang familiar dimaksudkan agar contoh lebih mudah dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, meskipun pada praktiknya nama dan juga lokasi dapat diganti sesuai kebutuhan penelitian.¹⁶ Adapun tahapan metode penelitian sejarah sebagai berikut:

1. Heuristik

Merupakan tahapan pertama dalam metedologi penelitian sejarah, tahapan ini peneliti harus mengumpulkan sumber-sumber sejarah sebagai bahan untuk

¹⁶ Kuntowijoyo. *PENGANTAR ILMU SEJARAH*. (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2018), hlm. 70

penulisan. Sebelum menetapkan teknik pengumpulan sumber sejarah, hal utama yang harus dipahami adalah bentuk sumber sejarah yang akan dihimpun. Penentuan jenis sumber tersebut akan berpengaruh terhadap Lokasi pencarian sumber, pihak yang dapat dijadikan narasumber dalam sumber lisan, serta metode yang digunakan untuk memperolehnya. Sebagaimana telah dijelaskan, sumber sejarah pada umumnya diklasifikasikan kedalam tiga bentuk.¹⁷ Dalam tahapan ini penulis berhasil menghimpun berbagai sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut didapat melalui penelusuran studi pustaka, serta sumber tertulis dari berbagai literatur yang sezaman maupun buku-buku yang terbit setelahnya.

Sumber tertulis yang diperoleh penulis meliputi buku-buku tentang sejarah ICMI yang didapatkan di Perpustakaan Nasional yang berada di Jl. Merdeka, kemudian majalah Suara Muhammadiyah serta buku biografi Ahmad Watik Pratiknya yang ditemukan di Perpustakaan Muhammadiyah Pusat di Menteng Jakarta Pusat, serta yang terakhir koran-koran yang sezaman hingga Kliping tentang dinamika awal tentang berdirinya ICMI yang didapatkan di Perpustakaan Nasional yang berada di Jl. Ampera.

a. Sumber Primer

Sumber Primer merupakan sumber-sumber yang ditemukan yang ditemukan pada waktu terjadinya sejarah atau dibuat oleh pelaku dan saksi sejarah baik itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Adapun sumber primer yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Tulisan

- a) Majalah Suara Muhammadiyah “Ulama dan Cendekiawan Berebut Otoritas” No 9 ke 76 1-15 Mei 1991
- b) Majalah Suara Muhammadiyah “Kembali Ke Fitri” No 8 ke 76 tahun 1991 Hal 30
- c) Kliping CSIS Intelektual Islam 1991 (berisi potongan koran-koran tentang ICMI)

¹⁷ Heryati, *PENGANTAR ILMU SEJARAH*. (Palembang, 2017)

- d) Buku yang berjudul “Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim” Karya M. Dawam Rahardjo. Penerbit Mizan, Bandung 1993
- e) Majalah Suara Muhammadiyah “Angin Islam di Indonesia” No 1 ke 79 Tahun 1994
- f) Koran Republika “ICMI dan Politik” No 324 Tahun ke 3 Senin, 4 Desember 1995
- g) Koran Republika No 327 tahun ke 3 7 Desember 1995 hal 6
- h) Koran Republika No 328 Tahun ke 3 8 Desember 1995 hal 5
- i) Koran Republika No 332 Tahun ke 3 12 Desember 1995 hal 11
- j) Buku yang berjudul “ICMI Kekuasaan dan Demokrasi” karya Ahmad Bahar, Afnan Malay, Ahmad Zaini Kabar, Dkk. PT Pena Cendekia Indonesia, Yogyakarta 1995
- k) Buku yang berjudul “ICMI Negara dan Demokratisasi, Catatan Kritis Kaum Muda” karya Gerakan Mahasiswa di Yogyakarta, Kelompok Studi Lingkaran, Yogyakarta 1995
- l) Buku yang berjudul “ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi” Karya Abdurrahman Wahid, Jalaluddin Rakhmat, Amien Rais, Kuntowijoyo, dkk. Mizan Bandung 1995
- m) Komisi A Organisasi: Anggaran Dasar Rumah Tangga Khittah Wawasan Pengabdian ICMI & Kode Etik Institusi Keuangan dan Pendanaan 1995

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber-sumber yang dapat dijadikan tambahan atau penguat dalam suatu kegiatan penulisan sejarah. Sumber ini dapat berupa buku, Skripsi, Jurnal, artikel dan majalah. Adapun sumber sekunder yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku

- a) A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad. "ICMI Dinamika Politik Islam di Indonesia" PT Pustaka Cidesino, Jakarta 1997
 - b) Robert W. Hefner "Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia" Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Yogyakarta 2001
 - c) Agung Prihantoro dan Ihab Habudin, "Bintang dari Argasoka Biografi Ahmad Watik Pratiknya" Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2018
 - d) Zuhroh Latifah, Arifin Syamsul, dkk "Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer" Adab Press, Yogyakarta, 2020
 - e) Zaim Uchrowi dan Usman Ks, "ICMI Bergerak Lintasan 10 Tahun Ikatan Cendekiawan Musli se-Indonesia" Republika, Jakarta, 2000.
- 2) Tesis
- a) Haniah Hanafie, "ICMI Sebagai Kelompok Kepentingan" Universitas Indonesia, 1996
- 3) Website
- a) Sejarah ICMI, <https://icmi.id/profil/sejarah>

2. Kritik

Setelah topik penelitian ditetapkan secara jelas ada sumber-sumber sejarah berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah kritik sejarah yang bertujuan untuk menilai keabsahan sumber. Kritik sejarah terdiri dari dua bentuk, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berkaitan dengan autentisitas atau keaslian sumber, yakni Upaya untuk memastikan apakah sumber tersebut benar-benar asli dan dapat di pertanggungjawabkan. Sementara, kritik intern berhubungan dengan kredibilitas sumber, yaitu penilaian terhadap Tingkat kepercayaan isi sumber serta sejauh mana informasi yang disampaikan dapat dipercaya.¹⁸

¹⁸ Kuntowijoyo, Op. Cit. hlm 77.

a. Kritik Ekstren

Kritik Ekstren yaitu cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Atas dasar berbagai alasan atau syarat, setiap sumber harus dinyatakan dahulu autentik. Dalam tahapan ini penulis harus bisa atau mampu memverifikasi sumber tersebut apakah sumber tersebut otentik atau tidak dan apakah sumber tersebut layak atau tidak untuk dijadikan sumber.

- 1) Majalah Suara Muhammadiyah “Ulama dan Cendekiawan Berebut Otoritas” No 9/79/1991, majalah ini didapatkan di Perpustakaan Muhammadiyah Pusat dalam Kumpulan-kumpulan majalah tahun 1991, walaupun isinya bukan semua tentang ICMI di dalamnya namun ada sekitar 5 halaman yang menceritakan tentang ICMI dan Cendekiawan. Secara fisiknya majalah tersebut masih dalam kondisi baik karena identitas bukunya masih sangat jelas, sehingga bisa dipastikan keasliannya.
- 2) Majalah Suara Muhammadiyah “Kembali ke Firti” No 8 ke 76 Tahun 1991, pembahasan tentang ICMI sendiri disini hanya ada 1 halaman namun, jika dilihat dari fisiknya cover majalah, kertas, nomor edisi, tahun terbit serta redaksinya masih jelas. Majalah ini juga berada di bagian majalah-majalah tahun 1991 jadi bisa dipastikan majalah ini asli keluaran tahun 1991.
- 3) Kliping CSIS Intelektual Islam 1991, kliping ini didapatkan dari Perpustakaan Nasional yang berada di Jalan Ampera, kliping ini berisi Kumpulan potongan-potongan artikel surat kabar terbitan tahun 1991 yang membahas isu-isu tentang ICMI dan juga intelektual Islam. Secara fisik, kliping tersebut masih bisa dibaca dengan jelas. Potongan-potongan koran yang dikompilasi berasal dari berbagai media cetak, bahkan ada juga tulisan media cetak yang masih memakai mesin Tik, didalam klipingnya pun dicantumkan identitas penerbit dan juga waktu terbitnya.

Keberadaan informasi ini menunjukkan bahwa kliping ini merupakan sumber yang autentik serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

- 4) Buku yang berjudul “Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim” karya yang ditulis oleh M. Dawam Rahardjo, Mizan Bandung 1993. Buku ini didapatkan oleh penulis di Perpustakaan Batu Api di Jatinangor, buku ini jika dilihat secara fisiknya masih terbilang sangat bagus karena tulisan, identitas buku, masih bisa dibaca secara keseluruhan. Kejelasan dari buku ini memperkuat bahwa buku ini dapat masuk kedalam kategori sumber yang asli dan kredibel.
- 5) Majalah Suara Muhammadiyah “Angin Islam di Indonesia” No 1 Tahun ke 79 tahun 1994. Majalah ini juga diperoleh dari perpustakaan Muhammadiyah Pusat dan bagian dari koleksi majalah terbitan tahun 1994. Secara fisik majalahnya masih tersimpan dengan baik dan dapat dibaca secara jelas dan juga utuh, baik dari penerbit, nomor edisi, serta tahun penerbitan. Kejelasan identitas ini memperkuat bahwa majalah ini asli bukan Salinan atau produksi tidak resmi. Dengan ini, majalah Suara Muhammadiyah dapat dikategorikan bahwa sumber ini sumber tertulis yang asli.
- 6) Koran Republika “ICMI dan Politik” No 324 Tahun ke 3 Senin, 4 Desember 1995, koran ini ditemukan dari Perpustakaan Nasional cabang Jalan Ampera yang Dimana perpustakaan tersebut yang menyimpan koleksi koran-koran terdahulu. Secara fisik, koran ini terkumpul dalam bentukan satu edisi atau bulan jika dilihat dari katalog Perpustakaan Nasional itu sendiri. Lembaran-lembaran korannya masih terjaga dan masih bisa dibaca sangat jelas, tintanya pun masih cukup tebal. Kejelasan

data tersebut menunjukkan bahwa sumber ini merupakan terbitan asli.

- 7) Koran Republika No 327 tahun ke 3 7 Desember 1995 hal 6, sumber ini juga masih sama ditemukan seperti koran sebelumnya yang didapat dari Perpustakaan Nasional cabang Jalan Ampera lantai 7, koran ini termasuk media cetak yang terbit secara rutin. Kondisi fisik masih sangat bisa untuk dibaca dengan jelas. Karena ada dalam satu bundel koran pada edisi bulan Desember tahun 1995.
- 8) Koran Republika No 328 Tahun ke 3 8 Desember 1995 hal 5, koran ini juga masih didapatkan di Perpustakaan Nasional yang menjadi pusat penyimpanan arsip surat kabar lama. Artikel yang dimuat dalam koran tersebut masih dengan keadaan utuh di edisi Desember 1995, identitas koran masih jelas tidak ada yang rusak. Keutuhan bentuk dan kejelasan identitas penerbit menunjukan dokumen ini asli dari periode yang diteliti.
- 9) Koran Republika No 332 Tahun ke 3 12 Desember 1995 hal 11, masih sama seperti sumber sebelumnya yang ditemukan di Perpustakaan Nasional, usia koran mungkin bisa dibilang sudah cukup lama namun masih sangat terlihat jelas baik dari tulisan, identitas, no edisi, dan lain sebagainya, yang mana koran tersebut memperkuat keabsahan dan keaslian sumber.
- 10) Buku yang berjudul "ICMI Kekuasaan dan Demokrasi" karya Ahmad Bahar, Afnan Malay, Ahmad Zaini Kabar, Dkk. Yang diterbitkan oleh PT Pena Cendekia Indonesia, di Yogyakarta pada tahun 1995. Buku ini didapatkan oleh penulis di Perpustakaan Nasional yang berada di Jalan Merdeka, buku ini lengkap dalam mencantumkan identitas, penerbit, tempat serta tahun terbit secara jelas. Dari segi fisik buku ini masih dalam kondisi baik, walaupun ada halaman yang terpisah dari bukunya namun masih cukup tersusun lengkap kertas-kertas dari buku ini.

Kejelasan unsur bibliografis menunjukan buku ini merupakan sumber tertulis yang asli karena dilihat dari tahun terbit juga buku ini cukup untuk di pertanggungjawabkan keasliannya.

- 11) Buku yang berjudul “ICMI Negara dan Demokratisasi, Catatan Kritis Kaum Muda” karya Gerakan Mahasiswa di Yogyakarta, Kelompok Studi Lingkaran, di terbitkan Yogyakarta tahun 1995. Buku ini merupakan tulisan-tulisan Mahasiswa Yogya yang dikumpulkan dalam satu buku. Buku ini juga sama didapatkan di Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka dan termasuk kedalam koleksi yang hanya dapat diakses melalui layanan ruang koleksi tertutup. Untuk mengakses buku ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran melalui OPAC Perpus kemudian mengajukan permintaan peminjaman kepada petugas perpustakaan. Buku ini tidak dapat dipinjam untuk di bawa pulang hanya boleh baca ditempat, meskipun masih terjaga dengan baik akses tersebut memperkuat aspek keaslian dan otoritas sumber.
- 12) Buku “ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi” merupakan Kumpulan tulisan lebih dari dua puluh pakar yang diterbitkan oleh Mizan, Bandung pada tahun 1995. Sumber ini ditemukan penulis di Perpustakaan Baru Api, Jatinangor. Secara fisik, kondisi dokumennya masih terbilang baik muali dari tulisan, identitas dan juga kertas masih terbaca dengan jelas, sehingga keaslian sumber dapat dipercaya. Tahun terbit 1995 juga relevan karena sezaman dengan perkembangan ICMI yang menjadi objek kajian.
- 13) Dokumen “Komisi A (Organisasi): Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Khittah Wawasan Pengabdian ICMI, dan Kode Etik Institusi Keuangan dan Pendanaan” merupakan dokumen resmi yang dihasilkan dalam Muktamar ICMI Pusat ke 2 yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1995, yang diterbitkan

oleh ICMI Pusat. Sumber ini ditemukan penulis di Perpustakaan Nasional, sebagai dokumen internal organisasi yang lahir langsung dari forum muktamar, sumber ini memiliki otoritas tinggi karena merupakan Keputusan resmi dan sah secara kelembagaan. Tahun terbit yang sezaman dengan periode kajian turut memperkuat aspek keaslian dan relevansi sumber ini.

b. Kritik Intern

Setelah suatu dokumen dipastikan keasliannya melalui kritik ekstern, tahap berikutnya dalam penelitian sejarah adalah kritik intern, yaitu penilaian terhadap Tingkat kepercayaan isi sumber. Pada tahap ini, fokus kajian tidak lagi terletak pada bentuk fisik atau identitas dokumen, melainkan pada kebenaran informasi yang berada didalamnya. Penulis perlu menelaah apakah data yang disajikan oleh suatu dokumen dapat dipercaya dan sesuai dengan konteks sejarah pada masa dokumen tersebut dihasilkan.¹⁹

- 1) Majalah Suara Muhammadiyah “Ulama dan Cendekiawan Berebut Otoritas” No 9 ke 76 1-15 Mei 1991, isi majalah ini dianalisis dengan memperhatikan posisi Suara Muhammadiyah sebagai media resmi organisasi Muhammadiyah. Tulisan yang dimuat menunjukkan sudut pandang keislaman modernis dan menempatkan ulama serta cendekiawan sebagai actor penting dalam dinamika umat Islam, termasuk dalam konteks kemunculan ICMI, informasi yang disajikan bersifat argumentative dan reflektif karena ada sedikit pembahasan yang membahas tentang antara MUI dan ICMI sehingga perlu dibaca dengan mempertimbangkan kecenderungan ideologis redaksi. Untuk memverifikasi informasi tersebut, penulis membandingkan isi tulisan dengan sumber-sumber lain yang

¹⁹ Ibid.

membahas dinamika awal ICMI dan posisi cendekiawan Muslim pada awal 1990-an. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa isu mengenai peran ulama, cendekiawan, dan perubahan otoritas keagamaan memang menjadi bagian dari dinamika intelektual pada masa tersebut. Dengan begtu, karena ditulis sezaman dengan peristiwa dan memuat analisis langsung terhadap wanaca otoritas keilmuan Islam, sumber ini dinilai kredibel dan layak digunakan.

- 2) Majalah Suara Muhammadiyah “Kembali Ke Fitri” No 8 ke 76 tahun 1991 Hal 30, isi majalah ini lebih bernuansa reflektif dan normatif terutama dalam mengaitkan nilai-nilai keislaman, dengan kondisi sosial dan intelektual umat Islam pada awal 1990-an. Dalam konteks kritik ini tulisan tersebut tidak secara eksplit membahas ICMI namun memuat pandangan yang relevan dengan semangat kebangkitan intelektual Muslim. Hasil verifikasi tertahap relevansi isi sumber menunjukkan bahwa informasi di dalamnya lebih mendukung pemahaman mengenai konteks pemikiran dan suasana wacana keislaman daripada memberikan data langsung mengenai aktivitas atau peran tokoh dalam ICMI.
- 3) Kliping CSIS Intelektual Islam 1991 (berisi potongan koran-koran tentang ICMI), kliping ini berisi potongan-potongan dari setiap surat kabar yang dikumpulkan menjadi satu, surat kabar ini membahas ICMI dari banyak ragam media dan juga sudut pandang. Dalam kritik intern ini dengan keberagaman sumber justru menjadi salah satu kekuatan sekaligus tantangan. Karena setiap artikelnya pasti memiliki kecenderungan dan juga kepentingan redaksi masing-masing, sehingga isi kliping ini perlu dibaca secara komparatif. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang muncul dalam berbagai surat kabar di dalam kliping. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa

informasi mengenai kemunculan ICMI, keterlibatan cendekiawan Muslim, serta munculnya respons pro dan kontra terhadap organisasi tersebut muncul secara berulang dalam lebih dari satu pemberitaan, meskipun masing-masing media memberikan penekanan yang berbeda. Kesamaan informasi tersebut meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap fakta yang berulang-ulang, sedangkan perbedaan sudut pandang membantu penulis memahami dinamika wacana publik mengenai ICMI secara lebih luas. Dengan demikian, klip ini dinilai kredibel apabila digunakan secara komparatif dan tidak menjadikan satu pemberitaan sebagai satu-satunya dasar penarikan kesimpulan.

- 4) Buku yang berjudul “Intelektual Intelligensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim” karya yang ditulis oleh M. Dawam Rahardjo, Mizan Bandung 1993. Isi buku ini membahas peran para Intelektual Muslim dan kedudukannya dalam dinamika sosial, budaya dan juga politik pada awal 1990-an yaitu periode yang sezaman dengan awal kemunculan pendirian ICMI. Meskipun buku ini bersifat analitis dan normatif argumentasi yang disajikan memberikan gambaran konseptual yang relevan dengan memahami keterlibatan Cendekiawan Muslim dalam wadah organisasi seperti ICMI. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan gagasan mengenai posisi dan peran cendekiawan Muslim dengan konteks berkembangnya ICMI sebagai wadah intelektual Muslim. Buku ini di nilai kredibel sebagai sumber pendukung untuk menjelaskan landasan pemikiran tokoh, tetapi tidak digunakan sebagai satu-satunya sumber untuk membuktikan peristiwa atau aktivitas tertentu.
- 5) Majalah Suara Muhammadiyah “Angin Islam di Indonesia” No 1 ke 79 Tahun 1994, dalam majalah ini, pembahasan mengenai Islam di Indonesia disajikan dalam sebuah kerangka analisis

sosial keagamaan yang begitu cukup luas. Hal ini difokuskan pada cara redaksi yang menafsirkan perkembangan Islam, termasuk peran organisasi dan cendekiawan Muslim. Tulisan-tulisan didalamnya cenderung menampilkan optimism terhadap kebangkitan Islam dan peran intelektual Muslim, sehingga perlu dibaca dengan perspektif ideologis dari pandangan Muhammadiyah. Hasil verifikasi terhadap isi sumber menunjukkan bahwa sumber ini lebih kuat digunakan untuk menggambarkan wacana dan pandangan Muhammadiyah mengenai Islam. Meskipun begitu isi majalah ini tetap relevan sebagai gambaran wacana Islam pada akhir 1990-an. Dengan demikian sumber ini dinilai kredibel sebagai sumber pendukung dalam memahami konteks wacana Islam pada masa tersebut.

- 6) Koran Republika No 324 Tahun ke 3 Senin, 4 Desember 1995, No. 327 Tahun ke-3 tanggal 7 Desember 1995, No. 328 Tahun ke-3 tanggal 8 Desember 1995 dan No. 332 Tahun ke 3 tanggal 12 Desember 1995 dianalisis secara bersamaan karena merupakan rangkaian pemberitaan yang membahas ICMI dan dinamika politik pada periode yang berdekatan. Dalam hasil verifikasi menunjukkan adanya kesimbungan informasi mengenai hubungan ICMI dengan persoalan politik, respons public, serta perdebatan mengenai posisi dan peran ICMI. Meskipun setiap isi artikelnya memiliki bentuk penyajian dan penekanan yang berbeda, informasi pokok mengenai dinamika ICMI pada periode tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Maka dari itu, informasi yang diperoleh tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar dalam penarikan Kesimpulan, melainkan dibandingkan dengan sumber lain yang relevan. Rangkaian pemberitaan tersebut dinilai kredibel sebagai sumber sejawat untuk merekonstruksi dinamika dan wacana mengenai ICMI pada

tahun 1995, khususnya apabila digunakan secara komparatif dengan sumber lain.

- 7) Buku yang berjudul “ICMI Kekuasaan dan Demokrasi” karya Ahmad Bahar, Afnan Malay, Ahmad Zaini Kabar, Dkk. PT Pena Cendekia Indonesia, Yogyakarta 1995, buku ini dianalisis sebagai karya kolektif yang bersifat kritis terhadap posisi ICMI dalam relasi kekuasaan dan juga demokrasi. Argumentasi yang diberikan dalam buku ini didukung oleh analisis konseptual dan konteks politik pada masanya. Meskipun penulis buku tersebut memiliki sikap kritis yang bisa dibilang cukup tegas hal tersebut menjadi sebuah nilai tambah untuk memahami perdebatan intelektual mengenai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dengan begitu buku ini dinilai kredibel terutama dalam representasi pandangan kritis kaum intelektual terhadap ICMI.
- 8) Buku yang berjudul “ICMI Negara dan Demokratisasi, Catatan Kritis Kaum Muda” karya Gerakan Mahasiswa di Yogyakarta, Kelompok Studi Lingkaran, Yogyakarta 1995, buku ini sendiri secara jelas menjelaskan perspektif aktivisme mahasiswa dan kelompok studi kritis terhadap hubungan antara ICMI, negara, dan proses demokratisasi. Dalam isi bukunya perlu dibaca dengan kesadaran akan posisi penulis sebagai kelompok oposisi intelektual. Meskipun memiliki kecenderungan kritis yang lumayan kuat, argumentasi yang disampaikan sangatlah relevan dengan kondisi politik saat itu dan juga mencerminkan dinamika wacana yang berkembang.
- 9) Buku “ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi” karya Tokoh ICMI yang terbit di penerbit Mizan Bandung 1995, buku ini memuat kumpulan tulisan lebih dari dua puluh pakar dengan latar belakang yang beragam, baik dari kalangan anggota ICMI maupun diluar ICMI, serta dari perspektif Muslim dan juga non-Muslim. Isi buku ini menunjukkan karakter kompilatif dan juga

analitis yang merekam secara langsung perdebatan intelektual mengenai posisi dan arah politik ICMI pada pertengahan 1990-an. Hasil verifikasi terhadap susuna dan keberagaman perspektif dalam buku menunjukkan bahwa sumber ini tidak menyajikan satu pandangan tunggal mengenai ICMI, melainkan memuat beragam penilaian terhadap hubungan ICMI, status quo, dan demokratisasi. Maka dari itu meskipun setiap tulisan tetap mencerminkan posisi penulisnya masing-masing, buku ini dinilai kredibel untuk memahami keragaman perdebatan intelektual mengenai posisi ICMI pada masa tersebut.

- 10) Dokumen “Komisi A (Organisasi): Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Khittah Wawasan Pengabdian ICMI, dan Kode Etik Institusi Keuangan dan Pendanaan” dokumen ini dapat dipercaya kredibilitasnya karena merupakan produk langsung dari forum muktamar yang bersifat resmi dan mengikat secara kelembagaan. Isi dokumen memuat perubahan pasal-pasal dalam AD/ART yang menunjukkan bahwa dokumen ini bersifat dinamis dan mencerminkan perkembangan organisasi ICMI pada periode tersebut. Hasil verifikasinya menunjukkan bahwa isi dokumen berkaitan langsung dengan struktur dan ketentuan resmi organisasi, termasuk perubahan pasal-pasal yang mencerminkan perkembangan kelembagaan ICMI pada periode tersebut.

3. Interpretasi

Interpretasi atau analisis sejarah, istilah lain ini yang sering digunakan untuk menafsirkan sejarah. Dalam penafsiran sejarah kerap dianggap sumber utama subjektifitas, interpretasi sendiri memang membuka ruang bagi subjektivitas sebab tanpa adanya proses penafsiran data sejarah tidak memiliki makna dan tidak mampu menjelaskan peristiwa masa lalu secara utuh. Interpretasi ini juga tidak dilakukan secara tunggal melainkan melalui dua tahapan utama yaitu analisis dan sintesis.

Analisis itu sendiri merupakan proses pengurain data sejarah untuk memahami makna, hububgan, serta konteks masing-masing fakta secara terpisah. Sementara itu sintesis adalah tahap penggabungan berbagai hasil analisis tersebut kedalam suatu kesatuan pemahaman yang utuh.²⁰

Dalam tahapan ini, setelah melalui proses pengumpulan sumber hingga tahapan kritik, penulis menggambarkan bahwa keterlibatan tokoh-tokoh Muhammdiyah dalam organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada periode awal perkembangannya memiliki signifikansi struktural yang kuat, hal ini dilihat dari posisi mereka dalam kepengurusan organisasi sekaligus keterlibatan aktif dalam dinamika awal organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Keterlibatannya tidak hanya terbatas pada jabatan formal dalam struktur organisasi kepengurusannya tetapi juga tercermin dalam proses perumusan gagasan serta pengambilan keputusannya. Jika dilihat latar belakang tokoh intelektual dan pengalaman organisatoris juga telah mereka miliki, tokoh-tokoh Muhammadiyah hadir sebagai bagian dari aktor yang berinteraksi langsung dengan struktur organisasi ICMI, sekaligus berperan dalam membentuk, memelihara, dan mengembangkan dinamika organisasi tersebut. Maka dari itu peran mereka dalam organisasi ICMI tidak bersifat sederhana.

Dengan interpretasi ini juga penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, yang mana pembedaan antara fungsi manifes dan fungsi laten memberikan landasan analitis yang penting dalam memahami dinamika peran tokoh dalam suatu struktur sosial. Konsep tersebut digunakan untuk menginterpretasikan keterlibatan tokoh Muhammadiyah dalam ICMI pada periode 1991-1995, dengan menekankan perbedaan antara tujuan yang secara sadar diupayakan dan konsekuensi yang muncul secara objektif diluar kesadaran para pelaku. Secara manifes juga, keterlibatan tokoh Muhammdiyah menunjukkan adanya upaya sadar untuk mengartikulasikan gagasan keislaman yang modern dan intelektual, serta memperkuat posisi umat Islam dalam ranah sosial, akademik dan politik. Peran ini juga tampak dalam kontribusi mereka terhadap perumusan

²⁰ Ibid.

pemikiran, pengembangan sumber daya manusia, serta partisipasi aktif dalam struktur organisasi ICMI. Dengan begitu, fungsi manifes dari keterlibatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi peran cendekiawan Muslim dalam mendorong kemajuan umat melalui jalur institusional.²¹

Namun, keterlibatan tersebut juga menghasilkan berbagai fungsi laten yang tidak secara terbuka direncanakan. Kehadiran tokoh Muhammadiyah dalam ICMI secara tidak langsung memberikan legitimasi sosial dan politik bagi organisasi tersebut, sekaligus memperluas jaringan pengaruh Muhammadiyah dalam skala nasional. Interaksi antara kepentingan organisasi keagamaan dan juga dinamika politik negara turut memunculkan implikasi yang lebih kompleks, semacam Tarik menarik kepentingan dan penyesuaian strategi dalam menghadapi realitas politik yang terus menerus berkembang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ini ada beberapa kasus terjadi perubahan fungsi laten menjadi fungsi manifes. Konsekuensi yang semula tidak disadari seperti penguatan posisi politik dan perluasan jaringan kekuasaan kemudian berkembang menjadi bagian dari strategi yang secara sadar dimanfaatkan oleh para tokoh.

Proses ini menunjukkan bahwa dinamika sosial tidak bersifat statis, melainkan terus bergerak seiring meningkatnya kesadaran aktor terhadap potensi keterlibatan mereka. Melalui pendekatan fungsi manifes dan laten ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi tujuan formal keterlibatan tokoh Muhammadiyah dalam ICMI, tetapi juga mengungkap suatu dimensi implisit yang turut membentuk dinamika organisasi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, tokoh Muhammadiyah dalam organisasi ICMI dapat dilihat bukan hanya sebagai individu dengan motivasi pribadi, melainkan sebagai agen sosial yang memproduksi nilai-nilai serta tradisi Muhammadiyah sekaligus berpotensi mentransformasi struktur organisasi ICMI. Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana peran tokoh tidak terlepas dari konteks sosial, politik dan budaya yang lebih luas, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengubahnya. Dengan begitu, pembahasan tidak lagi berhenti pada individu atau peran personal semata,

²¹ Robert K. Merton, *SOCIAL THEORY AND SOCIAL STRUCTURE*. (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1949), hlm. 63

melainkan diarahkan pada bagaimana praktik sosial para tokoh tersebut berkontribusi dalam reproduksi sekaligus potensi transformasi struktur organisasi ICMI pada fase awal perkembangannya.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah, yakni tahap ketika seluruh proses pencarian, penilaian, dan penafsiran sumber akhirnya diwujudkan dalam bentuk tulisan. Setelah melalui heuristik, kritik sumber, dan interpretasi, sejarawan mulai merangkai hasil penelitiannya menjadi sebuah kisah tentang masa lalu. Dalam tahap ini, sejarah tidak lagi dipahami sekadar sebagai kumpulan fakta yang berdiri sendiri, melainkan sebagai cerita yang memiliki alur, makna, dan keterkaitan antarkeadaan.²²

Tahapan ini juga merupakan bagian terakhir dari rangkaian panjang dalam metodologi sejarah, yang menjadi tahap penutup dari proses penelitian sejarah. Tahapan ini memiliki tujuan utama untuk menulis, mempresentasikan, atau melaporkan hasil penelitian sejarah. Dalam penelitian ini penulis menyajikan dalam beberapa rangkaian antara lain:

BAB I merupakan BAB Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah yang menjadi sebab penelitian ini menarik untuk dilakukan, setelah itu rumusan masalah, atau persoalan, yang akan diangkat oleh penulis, yang selanjutnya yaitu Kajian Pustaka yang merupakan sumber-sumber yang digunakan dan nantinya akan menjadi sebuah perbandingan dan terakhir yaitu metode penelitian yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, historiografi.

BAB II bab ini membahas latar belakang keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam organisasi ICMI pada fase awal perkembangannya. Pembahasan diawali dengan sejarah singkat berdirinya ICMI sebagai konteks sosial dan intelektual kemunculan organisasi tersebut. Selanjutnya, bab ini juga akan menguraikan latar belakang serta proses keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah

²² Heryati, Op.Cit hlm. 70

dalam ICMI, dengan menelusuri pengalaman intelektual dan organisatoris yang mendorong keterlibatan mereka.

BAB III bab ini membahas peran serta kontribusi tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam organisasi ICMI. Pembahasan difokuskan pada keterlibatan mereka dalam struktur organisasi, perumusan gagasan, serta dinamika pengambilan Keputusan di dalam ICMI. Dengan menggunakan perspektif teori manifest dan laten, peran tokoh-tokoh ini dipahami sebagai bagan dari proses tindakan sosial yang tidak hanya memproduksi struktur organisasi ICMI, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan dan transformasi dinamika intelektual serta kelembagaan ICMI pada masa awal perkembangannya.

BAB IV Merupakan akhir yang bagian dari penutup, berisi Kesimpulan dan juga saran. Pada bagian ini penulis akan merangkum hasil pembahasan dengan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, khususnya terkait dengan peran tokoh Muhammadiyah dalam Organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

